

## Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Kefamenanu

### *The Factor Analysis Of Influence Compliance Assessable Land And Building Tax In Kefamenanu District*

Emilia Khristina Kiha<sup>1</sup>

Fredrianus Nenomnanu<sup>2</sup>

emilia.kiha02@gmail.com<sup>1</sup>

Nenomnanu@gmail.com<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor<sup>12</sup>

#### Abstract

*The Land and Building Tax is one of the local tax prizes that contributes quite high among all components of the Original Revenue of the Middle East North District of Kefamenanu City District. The purpose of this research is to find out the influence of UN Services, Sanctions and Knowledge variables on Taxpayer Compliance in Kefamenanu District, North Central Timor Regency. The data used in this research is secondary data. The analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results of multiple linear regression analysis between UN Services, Sanctions and Knowledge variables show a significant effect on the Taxpayer Compliance variable. The determinant coefficient obtained a value of 0.983.*

**Keywords:** United Nations, Sanctions, Taxpayer Compliance

#### Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu primadona pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup tinggi di antara seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenanu. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Pelayanan PBB, Sanksi dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS. Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel Pelayanan, Sanksi dan Pengetahuan PBB menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien determinan diperoleh nilai sebesar 0,983.

**Kata kunci :** PBB, Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak

#### Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor terpenting dalam upaya percepatan pembangunan. Minimnya, realisasi PAD secara otomatis akan menghambat laju percepatan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Realisasi PAD ini masih sangat minim terutama di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenanu. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan pemerintah dimana dalam Pendapatan Asli Daerah telah ditentukan penerimaan daerah dalam pembangunan. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, dengan wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu primadona pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup tinggi di antara seluruh komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenanu, untuk itu ketersediaan sumber daya perpajakan yang memiliki kompetensi penilaian Pajak Bumi dan Bangunan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam rangka peningkatan kemampuan daerah didalam menilai pajak daerah. Pajak Bumi

dan Bangunan Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenanu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2011 dan mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2012. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan sejak menjadi pajak daerah sesuai UU No.28 Tahun 2009.

Adanya perangkat undang – undang yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan, namun pada kenyataannya masih ada masyarakat wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban kepada negara dalam hal membangun atau menyetor pajak bumi dan bangunan. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya kepatuhan wajib pajak karena adanya kecenderungan wajib pajak merasa keberatan kalau harta yang di kumpulkan atau diperoleh sebagian disetorkan kepada negara, sehingga menyebabkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diterima setiap tahunnya tidak sama seperti terlihat pada tabel dibawah.

**Tabel 1**  
**Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara**  
**Tahun 2010 – 2016**

No	Tahun	SPPT	Target	Realisasi	Persentasi %
1	2010	8023	319.173.695	174.219.938	56.71
2	2011	12,541	436.150.940	206.947.993	47.45
3	2012	12,017	422.806.361	223.075.322	52.74
4	2013	11,440	379.290.059	235.687.568	60.31
5	2014	11,961	426.570.225	218.121.149	51.13
6	2015	10,736	343.475.791	234.702.464	68.33
7	2016	10,131	322.330.459	231.383.174	71.78

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara*

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara melibatkan struktur pemerintahan dalam pencapaian tujuannya yang mana melibatkan Camat, Lurah, Kepala Lingkungan serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan bisa menghasilkan formulasi maupun solusi yang efektif, terhadap pemungutan tunggakan pajak bumi dan bangunan masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP). Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa ditahun 2010 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Kefamenanu cenderung mengalami peningkatan menjadi 71,78 %

Penentuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting karena sebagai titik awal menentukan besarnya jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dicapai didalam satu tahun pajak dan keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat diketahui dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Maka dapat dilihat apakah pelayanan pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan, sanksi tegas yang diberikan dan pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Handayani (2012 : 27), salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara adalah melalui optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Agenda dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi perpajakan dilakukan melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Sedangkan usaha intensifikasi dapat dilakukan dengan cara: Pertama, memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Kedua, memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. Ketiga,

meningkatkan pengawasan. Keempat, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Kelima, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembangunan dapat berjalan lancar. Hal ini Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Johar (2015) bahwa pelayanan, sanksi dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kualitas dalam pelayanan yang diterima sangat membantu dan mengurus kelancaran dalam melaksanakan pembayaran pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Pelayanan dalam membayar pajak dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Dalam keterkaitan antara sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah keterlambatan membayar pajak bumi dan bangunan yaitu adanya sanksi administrasi berupa (bunga, denda, dan kenaikan). Selain itu pengetahuan merupakan latar pendidikan pajak sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga memiliki wajib pajak yang tinggi tetapi tidak menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu beban mereka dan tanggung jawab sebagai masyarakat sehingga tidak keberatan untuk membayar pajaknya dengan sukarela. Oleh karena itu terjadi karena masyarakat memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah namun mereka juga memiliki harapan bahwa pajak yang mereka bayar harus dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan yang baik. Dan juga menemukan bahwa wajib pajak masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara “.

## Metode

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak di kecamatan kota kefamenanu yang menerima ketetapan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada tahun 2010 - 2016 sebanyak 76.849 orang yang terdapat di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2006). Penetapan besarnya sampel menggunakan rumus menurut Slovin, Sugiono (2007). Populasi untuk keseluruhan wajib pajak di 9 (sembilan) kecamatan kota kefamenanu kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2010 – 2016 sebanyak 76.849 WP. Dengan menggunakan rumus Slovin jumlah sampelnya diperoleh 100 WP. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 100 WP di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria - kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang tergolong berhak menerima SPPT.

### Variabel

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

- a. Variabel bebas (*independent variable*) yang dinotasikan dengan (X) adalah Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : variabel Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_1$ ), variabel Sanksi ( $X_2$ ) dan ( $X_3$ ) Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Variabel terikat (*dependent variable*) yang dinotasikan dengan (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2013). Untuk mengetahui apakah suatu sistem item valid atau gugur dapat dilakukan dengan mengkorelasikan skor masing-masing butir pertanyaan terhadap skor variabel. Pengujian validitas dalam penelitian ini dengan cara melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation* (r hitung) dari butir pertanyaan pada setiap variabel. Jika nilainya  $> 0,30$  dan positif, maka dikatakan valid. Kriteria penilaiannya juga berdasarkan perbandingan dengan menggunakan nilai *Sig 2- Tailed*. Jika *sig. (2-tailed)*  $< 0,05$  maka item dinyatakan valid dan sebaliknya.

#### Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi berganda memenuhi kriteria Blue (*Best, Linear, Unbiased, Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

#### Teknik Analisis Data

##### Analisis Deskriptif

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa data tentang variabel dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik.

##### Analisis Inferensial

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel secara statistik. Alat analisis yang digunakan adalah: Analisa Regresi Berganda. Alat analisa ini digunakan untuk untuk menganalisa, meramalkan atau memprediksi pengaruh variabel Pelayanan PBB ( $X_1$ ), variabel Sanksi ( $X_2$ ), dan variabel Pengetahuan PBB ( $X_3$ ) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon_i$$

Dimana :

Y = variabel Kepatuhan Wajib Pajak

$X_1$  = variabel pelayanan PBB

$X_2$  = variabel sanksi

$X_3$  = pengetahuan

PBB

$\square$  = nilai konstanta

$b_1, b_2, b_3$  koefisien regresi variabel Pelayanan PBB, Sanksi, dan Pengetahuan PBB  $\epsilon_i$  = error atau kesalahan pengganggu

### Teknik Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis berupa uji perbedaan antara nilai sampel dengan populasi atau nilai data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti (Erlina, 2008). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t, uji F, koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

### Pembahasan

#### Analisis Deskriptif

**Tabel 2**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	10.00	20.00	15.9100	3.11430
X2	100	9.00	20.00	15.6100	3.18740
X3	100	9.00	20.00	15.9000	3.08957
Y	100	15.00	32.00	25.4200	4.75709
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_1$ ) nilai mean yaitu sebesar 15,9100 berada pada kategori kedua. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Pelayanan PBB di Kecamatan Kota Kefamenanu telah dilakukan dengan baik. Dan untuk variabel Sanksi ( $X_2$ ) nilai mean yaitu sebesar 15.6100 berada pada kategori Keempat. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan pada wajib pajak PBB yang tidak mematuhi aturan PBB belum dilakukan dengan baik. Sedangkan Variabel Pengetahuan PBB ( $X_3$ ) berada pada kategori ketiga hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak cukup baik. Sedangkan untuk variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) nilai mean 25,4200 yaitu berada pada kategori pertama hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak di kecamatan Kota Kefamenanu tinggi.

### Hasil Uji Instrumen

Untuk dapat menggunakan instrumen penelitian, maka instrument harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas maksudnya bahwa instrument yang digunakan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang hendak diukur serta mengungkapkan data dari variabel – variabel penelitian. Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrument yang digunakan.

#### 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

##### Variabel Pelayanan PBB ( $X_1$ )

Untuk mengetahui alat yang digunakan dengan ketentuan jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 maka reliabel. Berdasarkan pengujian dengan bantuan program SPSS 21.0 for windows diperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,693 maka instrument ini dinyatakan reliabel karena nilai cronbach's alpha  $0,693 > 0,6$ . dan untuk mengukur

persoalan yang diteliti sesuai atau tidak, dapat digunakan uji instrument validitas, dengan ketentuan bila pada corrected item – total correlation dari item pertama sebesar 0,511 lebih besar dari 0,3 berarti valid (Sugiyono, 2006 :107). Dengan bantuan program SPSS 21.0 for windows. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima item pertanyaan yang digunakan pada variabel Pelayanan PBB ( $X_1$ ) valid dan reliabel.

**a) Sanksi ( $X_2$ )**

Untuk mengetahui alat yang digunakan dengan ketentuan jika nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 maka reliabel. Berdasarkan pengujian dengan bantuan program SPSS 21.0 for windows diperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,681 maka instrument ini dinyatakan reliabel karena nilai cronbach's alpha  $0,681 > 0,6$  dan untuk mengukur persoalan yang diteliti sesuai atau tidak, dapat digunakan uji instrument validitas, dengan ketentuan bila pada corrected item – total correlation dari item pertama sebesar 0,498 lebih besar dari 0,3 berarti valid (Sugiyono, 2008 :107). Dengan bantuan program SPSS 21.0 for windows. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima item pertanyaan yang digunakan pada variabel Sanksi ( $X_2$ ) valid dan reliabel.

**b) Pengetahuan PBB ( $X_3$ )**

Untuk mengetahui alat yang digunakan dengan ketentuan jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 maka reliabel. Berdasarkan pengujian dengan bantuan program SPSS 21.0 for windows diperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,651 maka instrument ini dinyatakan reliabel karena nilai cronbach's alpha  $0,651 > 0,6$ . dan untuk mengukur persoalan yang diteliti sesuai atau tidak, dapat digunakan uji instrument validitas, dengan ketentuan bila pada corrected item – total correlation dari item pertama sebesar 0,455 lebih besar dari 0,3 berarti valid (Sugiyono, 2006 :107). Dengan bantuan program SPSS 21.0 for windows. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima item pertanyaan yang digunakan pada variabel Pengetahuan PBB ( $X_3$ ) valid dan reliabel.

**c) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Untuk mengetahui alat yang digunakan dengan ketentuan jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 maka reliabel. Berdasarkan pengujian dengan bantuan program SPSS 21.0 for windows diperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,708 maka instrument ini dinyatakan reliabel karena nilai cronbach's alpha  $0,708 > 0,6$ . dan untuk mengukur persoalan yang diteliti sesuai atau tidak, dapat digunakan uji instrument validitas, dengan ketentuan bila pada corrected item – total correlation dari item pertama sebesar 0,527 lebih besar dari 0,3 berarti valid (Sugiyono, 2006 :107). Dengan bantuan program SPSS 21.0 for windows. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima item pertanyaan yang digunakan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) valid dan reliabel.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov Smirnov Z test. Dalam uji ini  $H_0$  yang digunakan adalah data observasi residual yang berdistribusi secara normal, dengan demikian jika hasil Kolmogorov Smirnov Z menunjukkan angka yang signifikan (jauh dibawah alfa = 0,05) maka artinya data residual observasi yang diuji tidak normal. Sebaliknya jika hasil uji Kolmogorov Smirnov Z menunjukkan angka signifikansi di atas 0,05 maka data

residual observasi berdistribusi normal.

**Tabel 3**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.56741704
Most Extreme Differences	Absolute	.204
	Positive	.102
	Negative	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		.812
Asymp. Sig. (2-tailed)		.004

a Test distribution is  
Normal. b Calculated  
from data.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai kolmogrov smirnovZ sebesar 0,812 lebih besar dari 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) yang mana regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai tolerance dan VIF pada hasil regresi Konsumsi Rumah Tangga sebagai variabel dependen. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi ini. Sebaliknya apabila nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas. Untuk itu uji multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearit y Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
(Constant)	-,032	,181		-,176	,861		
X1	,970	,161	,958	6,041	,000	,007	9,717
X2	,168	,191	,163	,879	,381	,005	9,174
X3	-,142	,064	-,134	-2,196	,031	,048	8,772

a. Dependent Variable: Y

Sumber : hasil pengolahan data dengan Program SPSS 21.0 For Windows, 2017

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel Pelayanan PBB ( $X_1$ ) , adalah sebesar 0,007 , variabel Sanksi ( $X_2$ ) sebesar 0,005 dan variabel Pengetahuan PBB ( $X_3$ ) sebesar 0,048 dan nilai VIF untuk variabel Pelayanan PBB ( $X_1$ ) sebesar 9,717 , variabel Sanksi ( $X_2$ ) sebesar 9,174 dan variabel Pengetahuan PBB ( $X_3$ ) sebesar 8,772 yang berarti tidak terdapat

gejala korelasi antara variabel independen (tolerance 0,007 ( $X_1$ ), 0,005( $X_2$ ) , 0,048 ( $X_3$ ) > 0,1 dan VIF 9,717 ( $X_1$ ),

9,174( $X_2$ ) , 8,772 ( $X_3$ ) < 10)

**c. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Untuk menguji autokorelasi maka menggunakan nilai Durbin – Watson. Menurut Santoso (2005 : 240), jika angka Durbin-Winston berada diantara -2 dan +2 maka autokorelasi.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,991 <sup>a</sup>	,983	,982	,424	1,634

- Predictors: (Constant),  $X_3$ ,  $X_1$ ,  $X_2$
- Dependent Variable: Y

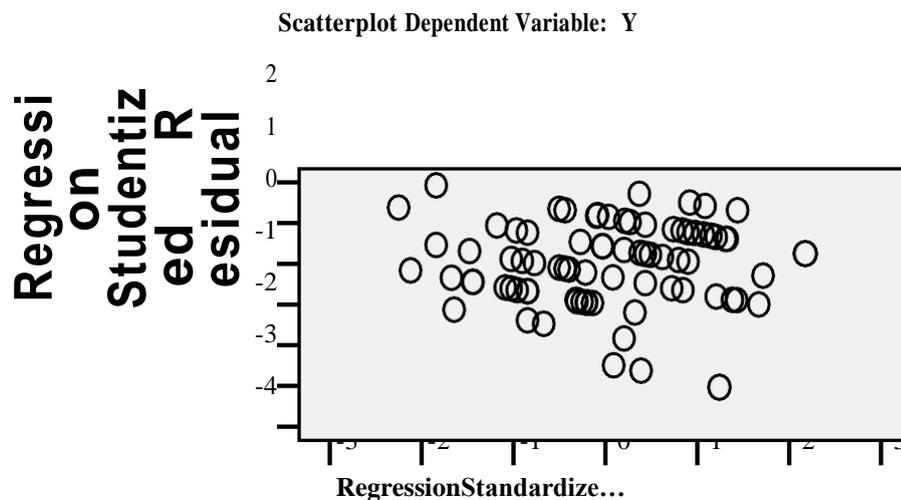
Sumber : hasil olahan SPSS 21.0 For Windows, 2017

Dari hasil analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.0 for windows menunjukkan bahwa angka Durbin-Winston adalah sebesar 1,634 yang berarti bahwa tidak ada gejala autokorelasi dalam model regresi ini yakni nilai Durbin-Winston  $-2 < 1,634 < 2$ .

**d. Uji Heterokedastisitas**

Dari hasil analisis dengan bantuan program software SPSS 21.0 for windows dapat dilihat bahwa penyebaran residual tidak teratur (tidak membentuk suatu pola tertentu). Kesimpulan yang bisa diambil bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas (gejala varians residual yang sama antar pengamatan) sehingga asumsi heterokedastisitas.

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : hasil pengolahan data dengan program SPSS 21.0 For Windows, 2017

### Analisis Inferensial

Pada bagian ini dilakukan analisis pengaruh antara masing-masing variabel bebas (X) yakni variabel Kualitas Pelayanan PBB ( $X_1$ ), Variabel Sanksi ( $X_2$ ) dan Variabel Pengetahuan PBB ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y); dan menganalisis pengaruh antara variabel-variabel bebas (X) secara serentak atau simultan terhadap variabel terikat (Y):

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara Pelayanan PBB ( $X_1$ ), Sanksi ( $X_2$ ) dan Pengetahuan PBB ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara bersama-sama. Untuk itu digunakan program SPSS 21.0 For Windows dalam menganalisis, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,032	,181		,176	,011
X1	,970	,161	,958	6,041	,000
X2	,168	,191	,163	,879	,001
X3	,142	,064	,134	2,196	,031

a. Dependent Variable: Y

Adapun persamaan hubungan antara variabel Pelayanan PBB ( $X_1$ ), Sanksi ( $X_2$ ), dan Pengetahuan PBB ( $X_3$ ) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_i$$

$$Y = 0,32 + 0,970 X_1 + 0,168 X_2 + 0,142 X_3 + \epsilon_i$$

Nilai  $\beta_0 = 0,32$ ; artinya jika tidak ada perubahan pada variabel Pelayanan PBB ( $X_1$ ), Sanksi ( $X_2$ ) dan variabel Pengetahuan PBB ( $X_3$ ) maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,32. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,970 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_1$  (Pelayanan PBB). Hal ini menunjukkan bahwa apabila Pelayanan PBB mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,970 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,168 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_2$  (sanksi). Hal ini menunjukkan bahwa apabila sanksi mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.168 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,142 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_3$  (pengetahuan PBB). Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan PBB mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.142 satuan dengan variabel yang lainnya dianggap konstan

### Pengaruh Parsial antara Variabel Pelayanan, Sanksi dan Pengetahuan PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian regresi secara parsial didapatkanlah point probabilitas dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 0,05. Nilai probabilitas ( $X_1$ ) sebesar  $0,000 < \alpha = 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel pelayanan ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel sanksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Dari hasil regresi secara parsial pada hasil penelitian ini didapat dengan signifikansi ( $X_2$ ) sebesar  $0,001 < \alpha = 0,05$ . Sedangkan koefisien beta dari sanksi sebesar

0,958 dan memiliki hubungan yang positif dan pastinya signifikan. Hasil penelitian variabel pengetahuan PBB ( $X_3$ ) didapatkan dengan nilai signifikan sebesar  $0,031 < \alpha = 0,05$ . Jadi dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

### **Pengaruh serentak (simultan) antara Variabel pelayanan, Sanksi dan Pengetahuan PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pelayanan ( $X_1$ ), Sanksi ( $X_2$ ) dan Pengetahuan PBB ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) secara simultan dapat diterima. Hal ini dijelaskan dengan nilai signifikansi F yaitu  $0,000 < 0,05$  dan nilai *adjusted R square* sebesar 0,982. Artinya bahwa 98,2% variabel Kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu pelayanan ( $X_1$ ), sanksi ( $X_2$ ) dan pengetahuan PBB ( $X_3$ ). Sedangkan sisanya 1,8% variabel Kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian seperti pelayanan ( $X_1$ ), sanksi ( $X_2$ ) dan pengetahuan PBB ( $X_3$ ) jika secara serentak ditingkatkan penerapan serta pelaksanaannya maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

### **Faktor berpengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Guna menentukan variabel bebas yang berpengaruh dominan dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linier, maka digunakan nilai Koefisien Beta (*Beta Coefficient*). Berdasarkan hasil tabel hasil analisis regresi terlihat bahwa variabel yang memiliki koefisien beta tertinggi terdapat pada variabel pelayanan ( $X_1$ ) dengan nilai koefisien beta sebesar 0,958. Jadi variabel pelayanan merupakan variabel dengan pengaruh dominan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusnidar (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB dan merupakan faktor yang dominan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prihartanto (2012) yang menyatakan bahwa pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan serta merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Pelayanan, sanksi dan pengetahuan terhadap tingkat kepatuhan dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, maka dapat dikemukakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: Secara parsial Pelayanan, sanksi dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dan secara serentak Pelayanan, sanksi dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

### **Daftar Pustaka**

- Erlina, 2008. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi kedua, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.

- Ilyas, Wirawan & Waluyo (2003). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Handayana, Sarita. 2012. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Pekanbaru. Riau: Universitas Riau.
- Johan Yusnidar, 2015. Pengaruh Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1 No.1
- Gempur, Santoso, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Jakarta: Gramedia
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mansyury, R., Ph. D. 2005. *Memahami Ketentuan Perpajakan Dalam Tax Treaties Indonesia*, Edisi Revisi. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan: Jakarta. 2002. *Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia Jilid X Royalti*. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4): Jakarta.
- Sugiyono.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan. UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Waluyo.2007. *Perpajakan Indonesia Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.